

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *goodgovernance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pemerintah Kabupaten Solok, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok telah, sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

3. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
4. Peraturan Bupati Solok Nomor 51 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindakpengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Kabupaten Solok sehinggadiharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Pemerintah Kabupaten Solok yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Solok.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat PemerintahKabupaten Solok. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2018.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Pemerintah Kabupaten Solok sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Solok, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu “irama” organisasi).

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Solok.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan

prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Solok untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Pemerintah Kabupaten Solok sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok Pemerintah Kabupaten Solok;
- Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- Disesuaikan dengan sifat khusus Pemerintah Kabupaten Solok;
- Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis;
- Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan;serta
- Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Solok dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan atas pengendalian intern dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah

telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Pemerintah Kabupaten Solok memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PEGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Kurang Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Kurang Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Kurang Memadai
6	Kebijakan Pengembangan SDM	Cukup Memadai
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Cukup Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Cukup Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	1)Menyusun Peraturan Bupati tentang aturan perilaku/kode etik
		1) Sosialisasi atas Perbup tentang aturan perilaku/kode etik
		2) Menyusun dan menandatangani pakta integritas untuk seluruh Aparatur
		3) Rapat staf terkait penyampaian kode etik/aturan perilaku oleh Pimpinan kepada staf (kode etik/aturan perilaku yang telah diatur pusat)
		4) rapat staf untuk membahas penerapan pakta integritas
II	Komitmen terhadap Kompetensi	1) Menyusun peta kompetensi Aparatur
		2)Koordinasi dengan terkait kompetensi Aparatur yang ada
		3) Melakukan evaluasi atas kompetensi Aparatur
		4)Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda dan BKPSDM terkait penilaian kompetensi Aparatur
		5) Evaluasi atas kompetensi masing-masing Pejabat Struktural
III	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	1) Memfungsikan seluruh Aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
		2) Penyusunan resiko atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Struktural yang bertanggungjawab
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	1) Penyusunan laporan pendelegasian wewenang atas setiap pendelegasian wewenang yang dilakukan
		2) Penyusunan SOP pendelegasian wewenang
		3) verifikasi dan pengujian batas kewenangan

Rincian rencana perbaikan dimaksud tertuang dalam **Lampiran I**.

BAB IV

RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2017, rencana tindak pengendalian yang disusun Pemerintah Kabupaten Solok diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditanganani. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh pihak auditor dan risiko yang teridentifikasi melalui diskusi manajemen, yaitu:

- 1) Terpenuhinya pengendalian kelahiran bagi akseptor KB baru
- 2) Terwujudnya peningkatan kinerja PPKBN, PPKBJ dan Sub PPKBJ dalam pelaksanaan KIE
- 3) Terwujudnya Remaja Saka Kencana yang memiliki keterampilan dalam KIE KRR
- 4) Meningkatnya kualitas tenaga pendamping dalam pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga
- 5) Terwujudnya keluarga sehat sejahtera bahagia
- 6) Terlindunginya perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Risiko atas pencapaian Tujuan 1 :

- 1) Tidak tersedia anggaran untuk jasa medis dalam pelayanan alat kontrasepsi untuk pelayanan peserta KB baru
- 2) Kurangnya jumlah personil tenaga penyuluh KB akan mengakibatkan rendahnya cakupan area yang tercover

- 3) Kompetensi tenaga penyuluh KB belum memadai sehingga dapat menghambat penyampaian program
- 4) Penurunan motivasi Kerja Penyuluh KB akan mengakibatkan tidak optimalnya dalam pelaksanaan program
- 5) SOP kegiatan belum disusun akan mengakibatkan tidak ada petunjuk pelaksanaan kegiatan yang baku
- 6) Partisipasi masyarakat sebagai peserta KB baru rendah sehingga mengakibatkan rendahnya pencapaian peserta KB baru.

Risiko atas pencapaian Tujuan 2 :

- 1) Rendahnya kapasitas SDM Kader akan mengakibatkan tidak optimalnya penyampaian program kepada masyarakat Tidak selesainya pekerjaan oleh pihak ketiga akan mengakibatkan tidak tersedianya dokumen perencanaan bidang pendidikan
- 2) Sarana dan prasarana pendukung belum memadai akibatnya pelayanan kader belum optimal
- 3) Proses perekrutan kader baru belum ada sehingga dapat berakibat tidak terjaringnya kader baru yang lebih potensial

Risiko atas pencapaian Tujuan 3 :

- 1) Jadwal program yang berbenturan dengan jadwal sekolah
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai sehingga mengakibatkan terbatasnya kreatifitas remaja
- 3) Kegiatan Saka Kencana tidak menjadi kegiatan prioritas
- 4) Rendahnya minat remaja terhadap program KRR

Risiko atas pencapaian Tujuan 4 :

- 1) Tidak adanya sinergitas antar poktan yang ada di masyarakat sehingga akibatnya sinkronisasi antar kegiatan tidak ada
- 2) Pemahaman tenaga pendamping kurang memadai akan berakibat kepada pelayanan yang tidak optimal.
- 3) Jumlah SDM/Aparatur yang menangani kegiatan Pelatihan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di Kecamatan tidak memadai sehingga berakibat tidak optimalnya pembinaan terhadap kader

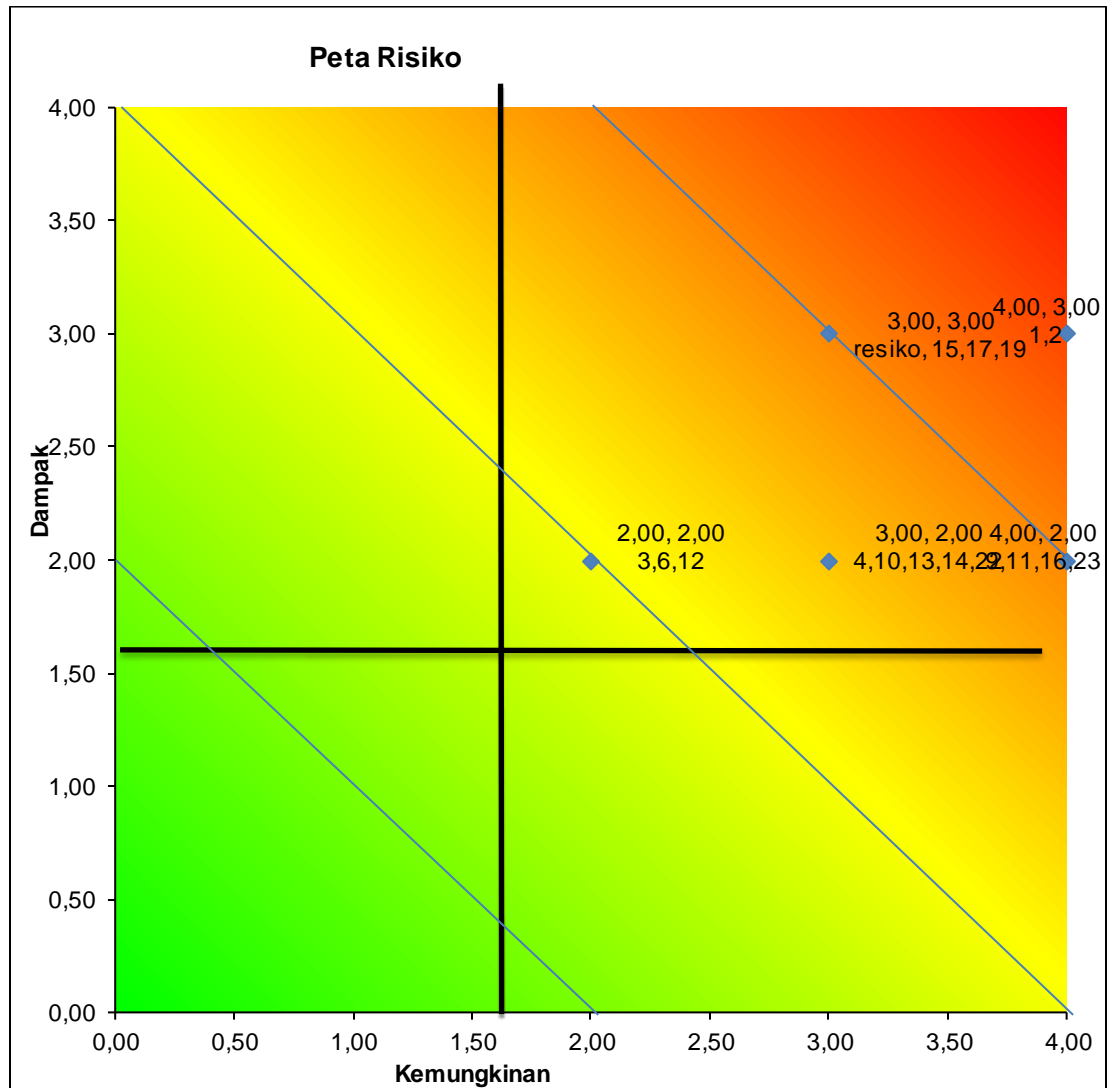
Risiko atas pencapaian Tujuan 5 :

- 1) hasil penyuluhan tidak didukung dengan tindak lanjut implementasi kegiatan selanjutnya sehingga akibatnya tidak tepat guna dan tidak bermanfaat
- 2) Materi penyuluhan tidak sesuai dengan kebutuhan mengakibatkan hasil kegiatan tidak tepat sasaran

Risiko atas pencapaian Tujuan 6 :

- 1) Kurangnya SDM yang memahami program P2TP2A mengakibatkan penanganan kasus tidak optimal
- 2) Kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait mengakibatkan lambatnya proses penanganan kasus
- 3) Kurangnya keterbukaan /informasi dari masyarakat mengakibatkan kasus-kasus yang terjadi tidak dilaporkan
- 4) Masih minimnya aturan yang mendukung pelaksanaan program
- 5) Tidak adanya SOP

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut.



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam **Lampiran II**.

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Solok telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasang, antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Sinkronisasi pembiayaan kegiatan dengan anggaran BKKBN,
- 2) Rapat-rapat koordinasi dengan OPD terkait,
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB jalur swasta (mandiri)

- 4) Optimalisasi aparatur yang ada melalui LDU dan pelatihan teknis lainnya,
- 5) Optimalisasi tupoksi penyuluh KB dengan dukungan operasional, sarana prasarana,
- 6) Penempatan PKB/PLKB sesuai dengan domisilinya.
- 7) Pelatihan teknis program KKBPK,
- 8) Monev bulanan oleh atasan
- 9) Penempatan PKB/PLKB sesuai dengan domisilinya,
- 10) Rotasi wilayah kerja,
- 11) Menghimpun juknis kegiatan yang ada
- 12) Penyuluhan program KKBPK kepada masyarakat,
- 13) Pelatihan program KKBPK bagi kader,
- 14) Pendampingan oleh Penyuluh KB,
- 15) Optimalisasi Operasional Kader,
- 16) Pemetaan kader sesuai dengan jumlah PUS ,
- 17) Koordinasi dengan pihak Sekolah,
- 18) Mengirim remaja mengikuti Lomba-lomba/ ajang pencarian bakat,
- 19) Forum GenRe
- 20) Advokasi kepada pengambil kebijakan
- 21) Sosialisasi/penyuluhan program KRR,
- 22) Koordinasi antar OPD yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 23) Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan bagi tenaga pendamping,
- 24) Evaluasi kompetensi aparatur pengelola kegiatan oleh atasan
- 25) Adanya program lanjutan pasca penyuluhan,
- 26) Pemetaan kebutuhan sasaran sebelum penyuluhan ,
- 27) Pelatihan teknis bagi aparatur pengelola program
- 28) Advokasi dan koordinasi dengan stakeholder ,
- 29) Sosialisasi keberadaan P2TP2A,
- 30) Pembentukan Forum P2TP2A tingkat Kecamatan

31) Sosialisasi dan implementasi aturan perlindungan perempuan dan anak

D. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan kepada rekomendasi pihak auditor.

Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun adalah sebagai berikut:

No	TUJUAN	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang masih dibutuhkan
1	Terpenuhinya pengendalian kelahiran bagi akseptor KB baru	1) Tidak tersedia anggaran untuk jasa medis dalam pelayanan alat kontrasepsi untuk pelayanan peserta KB baru 2) Kurangnya jumlah personil tenaga penyuluh KB akan mengakibatkan rendahnya cakupan area yang tercover 3) Kompetensi tenaga penyuluh KB belum memadai sehingga dapat menghambat penyampaian program 4) Penurunan motivasi Kerja Penyuluh KB akan mengakibatkan tidak optimalnya dalam pelaksanaan program	1) Dalam perencanaan kegiatan (RKA) harus dipastikan bahwa anggaran jasa medis ini dicantumkan, 2) SOP pelayanan pemasangan alkon, 3) Indeks biaya pelayanan per PB, Rekrutmen PKB/PLKB. 1) SOP pelayanan alkon, 2) Tingkat pendidikan minimal PKB yang harus dipenuhi. 1) Peningkatan biaya operasional penyuluh, 2) Penerapan sanksi

		<p>5) SOP kegiatan belum disusun akan mengakibatkan tidak ada petunjuk pelaksanaan kegiatan yang baku</p> <p>6) Partisipasi masyarakat sebagai peserta KB baru rendah sehingga mengakibatkan rendahnya pencapaian peserta KB baru.</p>	<p>1) SOP kegiatan pelayanan peserta KB baru 2) Sosialisasi SOP</p> <p>1) Pembinaan lanjutan terhadap peserta KB baru, 2) Piagam bagi peserta KB baru MKJP</p>
2	Terwujudnya peningkatan kinerja PPKBN.PPKBJ.dan Sub PPKBJ dalam pelaksanaan KIE	<p>1) Rendahnya kapasitas SDM Kader akan mengakibatkan tidak optimalnya penyampaian program kepada masyarakat Tidak selesainya pekerjaan oleh pihak ketiga akan mengakibatkan tidak tersedianya dokumen perencanaan bidang pendidikan</p> <p>2) Sarana dan prasarana pendukung belum memadai akibatnya pelayanan kader belum optimal</p> <p>3) Proses perekrutan kader baru belum ada sehingga dapat berakibat tidak terjaringnya kader baru yang lebih potensial</p>	<p>SK pemberian reward bagi kader yang meng KIE Akseptor KB baru MKJP yang dilengkapi dengan persyaratan pemberian reward</p> <p>1) Optimalisasi Operasional Kader, 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi kader</p> <p>1) Perekrutan kader baru yang potensial, 2) Revitalisasi kader, 3) Penempatan kader sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah binaan</p>
3	Terwujudnya Remaja Saka Kencana yang memiliki keterampilan dalam KIE KRR	<p>1) Jadwal program yang berbenturan dengan jadwal sekolah</p>	<p>1) Kalender Kegiatan KRR, 2)Sinergitas Program dengan proses Pendidikan di Sekolah, 3) Pelaksanaan kegiatan pada hari libur sekolah</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 2) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai sehingga mengakibatkan terbatasnya kreatifitas remaja 3) Kegiatan Saka Kencana tidak menjadi kegiatan prioritas 4) Rendahnya minat remaja terhadap program KRR 	<p>Penyusunan SOP kegiatan Saka Kencana Remaja,</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Promosi kegiatan Saka Kencana, 2) Indeks biaya kegiatan Saka Kencana <p>Study banding ke daerah pelaksana terbaik program KRR</p>
4	Meningkatnya kualitas tenaga pendamping dalam pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak adanya sinergitas antar poktan yang ada di masyarakat sehingga akibatnya sinkronisasi antar kegiatan tidak ada 2) Pemahaman tenaga pendamping kurang memadai akan berakibat kepada pelayanan yang tidak optimal 3) Jumlah SDM/Aparatur yang menangani kegiatan Pelatihan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di Kecamatan tidak memadai sehingga berakibat tidak optimalnya pembinaan terhadap kader 	<p>Koordinasi antar poktan yang ada di masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Selektif dalam proses rekrutmen tenaga pendamping, 2) Penyusunan buku panduan bagi tenaga pendamping <ul style="list-style-type: none"> 1) Rekrutmen staff untuk bidang KB/KK, 2) SK tim pembina tenaga pendamping
5	Terwujudnya keluarga sehat sejahtera bahagia	<ul style="list-style-type: none"> 1) hasil penyuluhan tidak didukung dengan tindak lanjut implementasi kegiatan selanjutnya sehingga akibatnya tidak tepat guna dan tidak bermanfaat 2) Materi penyuluhan tidak sesuai dengan kebutuhan mengakibatkan hasil kegiatan tidak tepat sasaran 	<p>Adanya program lanjutan pasca penyuluhan,</p> <p>Pemetaan kebutuhan sasaran sebelum penyuluhan ,</p>

6	Terlindunginya perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya SDM yang memahami program P2TP2A mengakibatkan penanganan kasus tidak optimal 2) Kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait mengakibatkan lambatnya proses penanganan kasus 3) Kurangnya keterbukaan /informasi dari masyarakat mengakibatkan kasus-kasus yang terjadi tidak dilaporkan 4) Masih minimnya aturan yang mendukung pelaksanaan program 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan SOP P2TP2A, 2)Pelatihan teknis bagi aparatur pengelola program , 3) Penempatan aparatur sesuai kompetensi <ol style="list-style-type: none"> 1)Penyusunan SOP P2TP2A, 2)Percepatan pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA) <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan Satgas P2TP2A tingkat Nagari , 2) Jaminan kerahasiaan identitas pelapor, 3) Jaminan perlindungan hukum bagi korban <p>Penerbitan Perbup tentang perlindungan perempuan dan anak,</p>
---	---	--	--

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam **Lampiran III**.

BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

No	TUJUAN	Pengendalian Yang Direncanakan	Media / Bentuk / Sarana / Pengkomunikasian
1	2	3	4
1	Terpenuhinya pengendalian kelahiran bagi akseptor KB baru	1) Dalam perencanaan kegiatan (RKA) harus dipastikan bahwa anggaran jasa medis ini dicantumkan, 2) SOP pelayanan pemasangan alkon, 3) Indeks biaya pelayanan per PB, 4) Rekrutmen PKB/PLKB. 5)SOP pelayanan alkon, 6) Tingkat pendidikan minimal PKB yang harus dipenuhi. 7)Peningkatan biaya operasional penyuluh, 8) Penerapan sanksi 9) SOP kegiatan pelayanan peserta KB baru 10) Sosialisasi SOP 11) Pembinaan lanjutan terhadap peserta KB baru, 12) Piagam bagi peserta KB baru MKJP	Sosialisasi, rapat koordinasi, laporan, surat tugas, Telaah Staf, nota dinas
2	Terwujudnya peningkatan kinerja PPKBN.PPKBJ.dan Sub PPKBJ dalam pelaksanaan KIE	1)SK pemberian reward bagi kader yang meng KIE Akseptor KB baru MKJP yang dilengkapi dengan persyaratan pemberian reward 2) Optimalisasi Operasional Kader, 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi kader 4) Perekrutan kader baru yang potensial, 5) Revitalisasi kader, 6) Penempatan kader sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah binaan	Sosialisasi, rapat koordinasi, nota dinas, laporan, telaah staff.

3	Terwujudnya Remaja Saka Kencana yang memiliki keterampilan dalam KIE KRR	<ul style="list-style-type: none"> 1) Kalender Kegiatan KRR, 2)Sinergitas Program dengan proses Pendidikan di Sekolah, 3) Pelaksanaan kegiatan pada hari libur sekolah 4)Penyusunan SOP kegiatan Saka Kencana Remaja, 5) Promosi kegiatan Saka Kencana, 6) Indeks biaya kegiatan Saka Kencana 7)Study banding ke daerah pelaksana terbaik program KRR 	Sosialisasi, rapat koordinasi, laporan, surat tugas
4	Meningkatnya kualitas tenaga pendamping dalam pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> 1)Koordinasi antar poktan yang ada di masyarakat 2) Selektif dalam proses rekrutmen tenaga pendamping, 3) Penyusunan buku panduan bagi tenaga pendamping 4) Rekrutmen staff untuk bidang KB/KK , 5) SK tim pembina tenaga pendamping 	Sosialisasi, rapat koordinasi, laporan, surat tugas
5	Terwujudnya keluarga sehat sejahtera bahagia	<ul style="list-style-type: none"> 1) Adanya program lanjutan pasca penyuluhan, 2)Pemetaan kebutuhan sasaran sebelum penyuluhan , 	Sosialisasi, rapat koordinasi, laporan, surat tugas
6	Terlindunginya perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan SOP P2TP2A, 2)Pelatihan teknis bagi aparatur pengelola program , 3) Penempatan aparatur sesuai kompetensi 4)Penyusunan SOP P2TP2A, 5)Percepatan pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA) 6) Pembentukan Satgas P2TP2A tingkat Nagari , 7) Jaminan kerahasiaan identitas pelapor, 8) Jaminan perlindungan hukum bagi korban 9)Penerbitan Perbup tentang perlindungan perempuan dan anak, 	Sosialisasi, rapat koordinasi, surat tugas, laporan, telaah staff.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam **Lampiran IV**.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing unit kerja SKPD pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi sebagai berikut.

1. Pemantauan terhadap proses pelaksanaan kegiatan.
2. Pemantauan terhadap hasil pelaksanaan program
3. Pemantauan terhadap tindak lanjut dari pelaksanaan program

Pemantauan berkelanjutan atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.

Rincian pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang dalam **Lampiran V**.

2. Evaluasi Terpisah

Inspektorat Kabupaten Solok melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan

untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil pelaksanaan program harus melaksanakan kegiatan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap SKPD memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII

PENUTUP

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

**An.KEPALA DPPKB dan P3A
KABUPATEN SOLOK**

**YUNARTI SAHARA, SH. MH
NIP.19740624 200604 2 004**

